

SKRIPSI

ANNISA FAUZIA

**OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU
BATAM DAN PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM
MENANGANI PEMBERIAN HAK ATAS BAGIAN TANAH
HAK PENGELOLAAN KEPADA PIHAK KETIGA DENGAN
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU
BATAM DAN PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM
MENANGANI PEMBERIAN HAK ATAS BAGIAN TANAH
HAK PENGELOLAAN KEPADA PIHAK KETIGA DENGAN
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.
NIP. 131 999 628

Penyusun



Annisa Fauzia
NIM. 030015018

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2003

Panitia Penguji Skripsi :

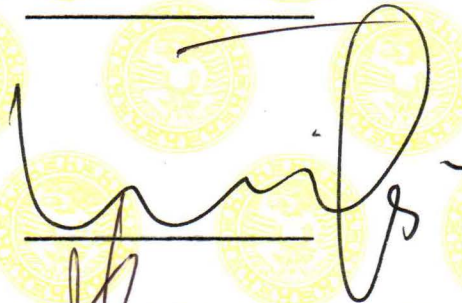
Ketua : Sumardji, S.H., M.Hum.



Anggota : 1. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.



2. Urip Santoso, S.H., M.H.



3. Sri Winarsih, S.H., M.H.



4. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.



MOTTO

Do The Right

Do The Best

And Let The ﷻ Take Care The Rest

***Sodaqoh yang lebih utama yaitu jika seseorang belajar pada ilmu
(mencari) kemudian dia mau mengajarkan pada saudaranya.***

H.R. Ibnu Madjah

Kata Pengantar

Segala puji Kehadirat ALLAH S.W.T yang telah memberikan rahmat-Nya atas kekuatan, kesabaran dan ilham-ilham yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Pemerintah Kota Batam Dalam Menangani Pemberian Hak Atas Tanah Hak Pengelolaan Kepada Pihak Ketiga Dengan Berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 ”.

Skripsi ini berhasil diselesaikan atas bantuan para dosen, teman-teman dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan judul yang penulis ambil begitu juga dorongan keluarga yang tidak kalah pentingnya, disini penulis ingin mengucapkan terima kasihnya atas bantuan yang diberikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, kepada :

1. Dekan beserta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah membantu kelancaran administrasi.
2. Bapak Agus Sekarmadji, S.H, M.Hum, yang telah mau dengan sabar membimbing, memberikan saran-saran dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Sumardji, S.H, M.Hum, Bapak Urip Santoso, S.H., M.H, Ibu Sri Winarsih, Bapak Dedy Santoso, S.H, yang telah bersedia menguji dan memberikan saran-saran dan tambahan pengetahuan kepada penulis.

4. Kepala Otorita Batam beserta Staffnya, yang telah bersedia memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis berupa data, peraturan dan komentar-komentar terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.
5. Kepala Pemerintah Kota Batam Beserta staffnya yang telah bersedia memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis berupa data, peraturan dan komentar-komentar terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.
6. Keluarga yang berada di Pulau Batam dan Jakarta, Mama, Papa, Ukon, Rani, Mas Bambang yang telah bersedia memberikan dukungan spiritual maupun moril kepada penulis.
7. Sobat-sobatku di Guben'x, Ike, Mba Retno, Mba Ana, Yeni, Mba Winda, Ames, Mas Andi, Putri, Aa'Yani dan teman-teman yang lain yang selalu memberikan semangat dan doa.
8. Teman-teman angkatan Milenium Nuning, Ninin, Elwin, Ratna, Agus, yang telah banyak membantu kelancaran dan kemudahan dalam penulisan ini.

Surabaya, 18 November 2003

Hormat Saya,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Kata Pengantar.....	v
Halaman Daftar Isi.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	8
3. Alasan Pemilihan Judul	12
4. Tujuan Penulisan	13
5. Metode Penelitian	14
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	16
 BAB II. PIHAK YANG MEMEGANG IZIN HAK PENGELOLAAN DI PULAU BATAM	 18
1. Sejarah Pembangunan Kota Batam.....	18
2. Keadaan Geografis Kota Batam.....	21

3.	Pihak Yang Berhak Mengelola Lahan di Pulau Batam Sebelum dan Sesudah UU No.22 tahun 1999	26
1.	Kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.....	26
2.	Kewenangan Pemerintah Kota Batam	41
3.	Hubungan Kerjasama Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam	44

BAB III PEMBERIAN HAK ATAS BAGIAN TANAH HAK

	PENGELOLAAN KEPADA PIHAK KETIGA.....	49
1.	Syarat dan Prosedur Permohonan Hak Pengelolaan Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria No.9 Tahun 1999	49
2.	Ketentuan Pengalokasian Tanah Serta Penggunaan Tanah Atas Bagian – Bagian Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam kepada Pihak Ketiga	53
3.	Praktek Pemberian Hak Atas Bagian Tanah Hak Pengelolaan Kepada Pihak Ketiga.....	57

BAB IV PENGARUH DUALISME KEWENANGAN ANTARA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM TERHADAP DUNIA INVESTASI 64

BAB V	PENUTUP	
1.	Kesimpulan	71
2.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN		